

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Pembahasan

##### 1. Kepemimpinan

Untuk melihat kemampuan memimpin diwilayah apabila nanti DIY dipimpin oleh Sultan perempuan akan dismapaikan tabel sebagai berikut

**Tabel 3.1**

Pendapat Responden Tentang Tingkat Kemampuan Sultan

Perempuan memimpin wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat Mampu	0	0
2	Mampu	1	1%
3	Tidak tahu	54	99%
4	Tidak mampu	0	0
5	Tidak mampu sama sekali	0	0
	Jumlah	55	100%

Sumber: kuesioner

Tabel 3.1 tentang Pendapat Responden Tentang Tingkat Kemampuan Sultan Perempuan memimpin wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diatas menunjukkan bahwa 99% anggota DPRD DIY tidak tahu bahkan tidak bisa membayangkan sultan perempuan memimpin DIY selain daripada itu mereka mengakui bahwa sultan harus di pegang oleh laki laki hal ini dipengaruhi kultur jogja yang ‘nrimo’ dengan keadaan keadaan yang sudah berlalu.

“Sutan Yogyakarta memang harus dipegang laki laki karena sesuai dengan RUUK dan pendahulu pendahulu yang sudah dari dulu dimana sultan Yogyakarta harus dipegang laki laki (subarno, febuari 2017) “

Tetapi salah satu responden mengatakan :

:”andai kata sultan DIY di pegang oleh perempuan bisa saja pariwisata yang sudah maju semakin maju karena selera wanita dalam mengelola keindahan lebih bagus daripada laki laki.( sukarman, febuari 2017) “

Untuk mengetahui kemampuan memimpin masyarakat apabila DIY nanti dipimpin oleh sultan Perempuan akan disampaikan dalam table berikut

Tabel 3.2

Pendapat Responden Tentang Tingkat Kemampuan Sultan Perempuan Memimpin Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat Mampu	0	0

2	Mampu	1	1%
3	Tidak tahu	54	99%
4	Tidak mampu	0	0
5	Tidak mampu sama sekali	0	0
	Jumlah	55	100%

Sumber: Kuesioner

Table 3.2 di atas menunjukkan bahwa 99% anggota DPRD DIY tidak tahu bahkan tidak bisa membayangkan jika nantinya DIY dipimpin oleh sultan perempuan dan mereka mengakui sultan harus dipimpin oleh laki laki dengan alasan jika dipimpin oleh laki laki karena lebih tegas dalam memimpin

“karena sultan Yogyakarta sekaligus gubernur Yogyakarta memang harus laki laki karena di dalam sejarah kraton Yogyakarta sendiri bahwa pemimpin kraton adalah seorang laki laki dan ini di dasari dengan status keistimewaan di DIY an seorang laki laki lebih tegas dalam memimpin (Subarno, febuari 2017)”

Akan tetapi salah seorang responden mengatakan sultan DIY perlu dipimpin perempuan karena lebih santun dan halus dalam memimpin masyarakat.

“Bisa saja jika nantinya sultan perempuan memimpin DIY karena jika dipimpin oleh perempuan nantinya bisa lebih santun dalam memimpin dengan kultur Yogyakarta yang masyarakatnya terkenal santun dalam bertingkah laku” (Nurjanah, 2017)”

Untuk melihat kemampuan sultan mencegah tindakan kriminal apabila nanti DIY dipimpin sultan perempuan akan disampaikan dalam table berikut :

Untuk mengetahui pandangan DPRD DIY jika DIY dipimpin oleh sultan perempuan akan ditunjukkan dalam table berikut :

**Table 3.3**

**Pendapat Responden Tentang Kemampuan Sultan Perempuan Memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat Mampu	0	0
2	Mampu	1	1%
3	Tidak Tahu	0	0
4	Tidak pantas	0	0
5	Tidak pantas sama sekali	54	99%
	Jumlah	55	100%.

Sumber: Kuesioner

Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa 99% anggota DPRD DIY mengatakan sultan DIY tidak pantas sama sekali dipimpin sultan perempuan karena sultan DIY harus dipimpin oleh seorang laki laki.

“karena dalam sejarah kasultanan Yogyakarta sultan Yogyakarta dipegang oleh laki laki dikarenakan sudah menjadi tradisi dari

pendahulu pendahulu sultan Yogyakarta selalu lakilaki dan itu sudah menjadi tonggak sejarah dalam kraton Yogyakarta (Subarno, 2017)”

Akan tetapi salah seorang responden mengatakan sultan DIY bisa dipimpin oleh seorang perempuan. Karena saat ini sudah memasuki zaman modernisasi jadi perlu adanya kesetaraan gender

“ Sultan Yogyakarta bisa dipimpin oleh perempuan karena sekarang zaman semakin modern dan sekarang kesetaraan ada gender”

Untuk mengetahui pandangan DPRD DIY terhadap sultan perempuan menjadi khalifatullah akan disampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**

**Pendapat Responden Tentang Kemampuan Sultan Perempuan Menjadi Khalifatullah**

No	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat Mampu	0	0
2	Mampu	1	1
3	Tidak Tahu	0	0
4	Tidak pantas	0	0
5	Tidak pantas sama sekali	54	99%
	Jumlah	55	100%

Sumber : Kuesioner

Tabel 3.6 Pendapat Responden Tentang Kemampuan Sultan Perempuan Menjadi Khalifatullah diatas menunjukan bahwa 99% anggota DPRD DIY mengatakan tidak pantas karena di dalam islam

yang namanya khalifatullah itu bukan dari perempuan karena hampir sama dengan imam sedangkan imam perempuan itu tidak diperbolehkan. “tidak pantas karena di dalam islam yang namanya khalifatullah itu bukan dari perempuan karena hampir sama dengan imam sedangkan imam perempuan itu tidak diperbolehkan (subarno, 2017”

Akan tetapi salah seorang responden mengatakan bisa saja di pimpin oleh perempuan karena gelar khalifatullah telah dihilangkan.

“Kalau sekarang bisa saja sultan dipimpin oleh perempuan karena sekarang gelar khalifatullah telah dihilangkan “

## 2. DPRD DIY

Untuk mengetahui pandangan DPRD DIY menentukan pimpinan daerah di DIY akan disampaikan dalam table berikut ini

**Tabel 3.5**

### **Pendapat Responden Tentang DPRD DIY Mempunyai Hak**

#### **Menentukan Pemimpin Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat setuju	0	0
2	Setuju	55	100%
3	Tidak setuju	0	0
4	Kurang Setuju	0	0
5	Tidak setuju sama sekali	0	0
	Jumlah	55	100%

Sumber: kuesioner

Tabel 3.7 Pendapat responden tentang DPRD DIY mempunyai hak menentukan pemimpin daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta diatas menunjukan 100% anggota DPRD DIY setuju jika DPRD DIY mempunyai hak dalam menentukan pimpinan daerah di DIY karena berdasarkan Undang Undang keistimewaan no 13 tahun 2012 dan bukan hanya DPRD DIY semua warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin daerah.

Untuk mengetahui DPRD mempunyai kewajiban dalam mementukan pemimpin daerah Ddi DIY ini akan di sampaikan :

**Tabel 3.6**

**Pendapat Responden DPRD DIY mempunyai kewajiban menentukan pemimpin Daerah**

No	Pendapat Responden	Jumlah	%
1	Sangat setuju	0	0
2	Setuju	55	100%
3	Tidak setuju	0	0
4	Kurang Setuju	0	0
5	Tidak setuju sama sekali	0	0
	Jumlah	55	100%

Dalam tabel 3.8 DPRD DIY mempunyai kewajiban menentukan pemimpin Daerah diatas menunjukkan bahwa 100% anggota DPRD DIY setuju jika mempunyai kewajiban dalam menentukan pemimpin daerah di DIY ini sesuai dengan undang undang keistimewaan no 13 tahun 2012, karena pemimpin daerah nantinya kerjanya juga dengan DPRD maka tidaklah aneh jika DPRD DIY punya kewajiban menentukan pemimpin daerah.

“ini sesuai dengan undang undang keistimewaan no 13 tahun 2012, karena pemimpin daerah nantinya kerjanya juga dengan DPRD maka tidaklah aneh jika DPRD DIY punya kewajiban menentukan pemimpin daerah”(subarno,2017)

Tabel 3.7

Pendapat Responden Tentang Gubernur DIY dicampuri oleh

pusat

No	Pertanyaan	Jumlah	%
1	Sangat setuju	0	0
2	Setuju	55	100%
3	Tidak tahu	0	0
4	Kurang Setuju	0	0
5	Tidak setuju sama sekali	0	0
	Jumlah	55	100%

Sumber: Kuesioner

Dari tabel 3.15 Gubernur DIY dicampuri oleh pusat diatas menunjukkan bahwa 100% anggota DPRD DIY setuju jika urusan Gubernur DIY dicampuri oleh pemmerintah pusat karena gubernur



merupakan tangan kanan pemerintah pusat yang ada di daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan jika ada masalah yang ada di daerah pemerintah daerah bisa tanggap dan langsung menanganinya

Untuk mengetahui pandangan DPRD DIY terhadap urusan Gubernur dicampuri urusan DPRD DIY dapat dilihat di tabel berikut :

## **B. Analisis**

Berdasarkan analisis pembahasan di muka maka peneliti menyampaikan analisis sebagai berikut :

1. Anggota DPRD DIY tidak tahu bahkan tidak bisa membayangkan sultan perempuan memimpin DIY selain daripada itu mereka mengakui bahwa sultan harus di pegang oleh laki laki hal ini dipengaruhi kultur Yogyakarta yang 'nrimo' dengan keadaan keadaan yang sudah berlalu. Tetapi ada juga yang mengatakan andai kata sultan DIY di pegang oleh perempuan bisa saja pariwisata yang sudah maju semakin maju karena selera wanita dalam mengelola keindahan lebih bagus daripada laki laki.
2. Anggota DPRD DIY tidak tahu bahkan tidak bisa membayangkan jika nantinya DIY dipimpin oleh sultan perempuan dan mereka mengakui

sultan harus dipimpin oleh laki laki dengan alasan jika dipimpin oleh laki laki karena lebih egas dalam memimpin Akan tetapi salah seorang responden mengatakan sultan DIY perlu dipimpin perempuan karena lebih santun dan halus dalam memimpin masyarakat.

3. Anggota DPRD DIY tidak tahu bahkan tidak bisa membayangkan jika nantinya DIY dipimpin oleh sultan perempuan dan mereka mengakui sultan harus dipimpin oleh laki laki dengan alasan jika dipimpin oleh laki laki karena lebih egas dalam memimpin Akan tetapi salah seorang responden mengatakan sultan DIY perlu dipimpin perempuan karena lebih santun dan halus dalam memimpin masyarakat.
4. Dalam memimpin DIY anggota DPRD DIY mengatakan sultan DIY tidak pantas sama sekali dipimpin sultan perempuan karena sultan DIY harus dipimpin oleh seorang laki laki. Akan tetapi salah seorang responden mengatakan Sultan DIY bisa dipimpin oleh seorang perempuan.
5. Anggota DPRD DIY mengatakan Sultan perempuan tidak pantas menjadi khalifatullah karena di dalam islam yang namanya khalifatullah itu bukan dari perempuan karena hampir sama dengan imam sedangkan imam perempuan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi salah seorang responden mengatakan bisa saja di pimpin oleh perempuan karena gelar khalifatullah telah dihilangkan.

6. Semua anggota DPRD DIY setuju jika mempunyai kewajiban dalam menentukan pemimpindaerah di DIY ini sesuai dengan undang undang keistimewaan no 13 tahun 2012, karena pemimpin daerah nantinya kerjanya juga dengan DPRD maka tidaklah aneh jika DPRD DIY punya kewajiban menentukan pemimpin daerah.
7. Semua anggota DPRD DIY setuju jika urusan Gubernur DIY dicampuri oleh pemmerintah pusat karena gubernur merupakan tangan kanan pemerintah pusat yang ada di daerah.dan gubernur nantinya akan membantu pemerintah pusat dalam menangani masalah masalah yang ada di daerah
8. Semua anggota DPRD DIY setuju jika urusan Gubernur DIY dicampuri oleh DPRD DIY karena dalam hal ini antara Eksekutif dan Yudikatif harus ada sinergitas dalam memajukan Pemerintahan di DIY. Dalam hal ini antara Eksekutif dan Legislatif perlu saling kerjasama dalam memajukan sektor sektor penting di DIY.

Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD tidak sepakat jika sultan Yogyakarta berjenis kelamin perempuan karena sultan Yogyakarta harus mentaati RUUK yang telah disahkan dikarenakan jika melanggar maka akan berdampak buruk bagi Yogyakarta karena RUUK itu memang dikhususkan untuk DIY dan sikap DPRD DIY terhadap polemic ini adalah kolektif kolegial yang berarti cara pengambilan keputusan secara bersama-sama (kolektif) dan dilakukan secara

setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain (kolegial).selain itu juga wacana sultan perempuan ini bukan saja menjadi masalah di DIY saja tetapi di tingkat pusat pun sedang membahas wacana sultan perempuan ini